

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEANDALAN DAN *TIMELINESS* PELAPORAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

(Studi pada BLU di Kota Semarang)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi

Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

FARISTINA ROSALIN

NIM C2C007039

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2011

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Faristina Rosalin

Nomor Induk Mahasiswa : C2C007039

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEANDALAN
DAN *TIMELINESS* PELAPORAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM (STUDI PADA BLU DI KOTA
SEMARANG)**

Dosen Pembimbing : Warsito Kawedar, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 15 Juni 2011

Dosen Pembimbing,

(Warsito Kawedar, S.E., M.Si., Akt.)

NIP. 19740510 199802 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Faristina Rosalin
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007039
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEANDALAN
DAN *TIMELINESS* PELAPORAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM (STUDI PADA BLU DI KOTA
SEMARANG)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 28 Juni 2011

Tim Penguji

1. Warsito Kawedar, S.E., M.Si., Akt. (.....)
2. Puji Harto, S.E., M.Si., Akt. (.....)
3. Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Faristina Rosalin, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan *Timeliness* Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi Pada BLU Di Kota Semarang)** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 15 Juni 2011

Yang membuat pernyataan,

(Faristina Rosalin)

NIM : C2C007039

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang andal dan tepat waktu dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan berbagai pihak.

Variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan komitmen organisasi (sebagai variabel independen) terhadap keandalan pelaporan keuangan (sebagai variabel dependen) dan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan komitmen organisasi (sebagai variabel independen) terhadap *timeliness* pelaporan keuangan (sebagai variabel dependen). Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarlang langsung kepada responden. Data yang berhasil dikumpulkan berasal dari 102 responden yang merupakan staf pelaporan keuangan BLU di Kota Semarang. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini adalah pada pengujian pertama didapatkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi, pengendalian intern akuntansi, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Pada pengujian kedua didapatkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas sumber daya manusia dan pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* pelaporan keuangan.

Kata kunci : Pelaporan keuangan, keandalan pelaporan keuangan, *timeliness* pelaporan keuangan.

ABSTRACT

This study aims to examine and obtain empirical evidence about factors that affect the reliability and timeliness of financial reporting. This research is motivated by the fact that the government financial reporting should provide information on reliable and timely in assessing accountability and decision making of various parties.

Variables that will be tested in this study is the quality of human resources, utilization of information technology, accounting internal controls, and organizational commitment (as an independent variable) against the reliability of financial reporting (as the dependent variable) and the quality of human resources, utilization of information technology, accounting internal controls and organizational commitment (as an independent variable) on the timeliness of financial reporting (as the dependent variable). The data in this study is the primary data obtained from questionnaires distributed directly to the respondents. Data collected from 102 respondents who are BLU financial reporting staff in the city of Semarang. The hypothesis in this study were tested using multiple linear regression.

The results of this study is the first test showed that the utilization of technology, internal accounting controls, and organizational commitment significantly influence the reliability of financial reporting. While the quality of human resources did not significantly influence the reliability of financial reporting. In the second test showed that the utilization of information technology and organizational commitment significantly influence the timeliness of financial reporting. While the quality of human resources and accounting internal controls did not significantly influence the timeliness of financial reporting.

Keywords: Financial reporting, reliability of financial reporting, timeliness of financial reporting.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu.

- William Feather

Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak.

- Aldus Huxley

Persembahan :

*Skripsi ini aku persembahkan untuk kedua orang tuaku
yang selama ini menjadi guru sepanjang hidupku,
selalu memberikan kasih sayang, cinta,
dukungan, nasehat, ketulusan dan doa
yang tidak pernah putus.
Aku bangga menjadi putrimu.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi Pada BLU Di Kota Semarang)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Warsito Kawedar, S.E., M.Si., Akt selaku dosen pembimbing yang atas waktu yang telah diluangkan untuk arahan, bimbingan dan petunjuk dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak, Marsono, S.E., M.Adv. Acc., Akt selaku dosen wali atas bimbingan yang telah diberikan.
4. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro untuk ilmu bermanfaat yang telah diajarkan.

5. Seluruh staf tata usaha dan perpustakaan atas segala bantuan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Kedua orangtua, adik-adik, dan segenap keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, doa, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Pegawai-pegawai di KPPN Semarang II yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas masukan dan segala bantuan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
8. Segenap rekan-rekan Fakultas Ekonomi UNDIP, terkhusus Jurusan Akuntansi angkatan 2007 atas dukungan dan semangat yang diberikan.
9. Seluruh responden staf pelaporan keuangan di Kota Semarang yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Pihak-pihak lain yang telah membantu penyelesaian skripsi, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan mendapat balasan dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Amin. Akhir kata penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan dan penyajian skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Juni 2011

Penulis,

Faristina Rosalin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1

1.2	Rumusan Masalah	7
1.3	Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1	Tujuan Penelitian	8
1.3.2	Manfaat Penelitian	8
1.4	Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	TELAAH PUSTAKA	11
2.1	Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	11
2.1.1	<i>Agency Theory</i> (Teori Keagenan).....	11
2.1.2	Teori Kepatuhan.....	14
2.1.3	Pelaporan Keuangan di Organisasi Sektor Publik	15
2.1.4	Penjelasan tentang Badan Layanan Umum...	18
2.1.5	Penelitian Terdahulu	21
2.2	Kerangka Pemikiran.....	23
2.3	Hipotesis	24
BAB III	METODE PENELITIAN.....	31
3.1	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	31
3.1.1	Variabel Dependen	31
3.1.2	Variabel Independen	35
3.2	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ..	43
3.3	Jenis dan Sumber Data	44
3.4	Metode Pengumpulan Data	45
3.5	Metode Analisis Data	46
3.5.1	Uji Statistik Deskriptif	46

3.5.2	Uji Kualitas Data.....	46
3.5.3	Uji Asumsi Klasik	47
3.5.4	Uji Hipotesis.....	51
BAB IV	HASIL DAN ANALISIS	55
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	55
4.1.1	Deskripsi sampel Penelitian	55
4.1.2	Demografi Responden Penelitian.....	56
4.2	Analisis Data	59
4.2.1	Statistik Deskriptif Penelitian	59
4.2.2	Uji Kualitas Data.....	61
4.2.3	Uji Asumsi Klasik	65
4.2.4	Uji Hipotesis.....	74
4.3	Interpretasi Hasil	81
4.3.1	Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H_1).....	81
4.3.2	Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)	82
4.3.3	Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H_3)	82
4.3.4	Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Keempat (H_4)	83
4.3.5	Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Kelima (H_5).....	84

4.3.6	Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Keenam (H_6)	85
4.3.7	Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Ketujuh (H_7).....	86
4.3.8	Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Kedelapan (H_8).....	87
BAB V	PENUTUP.....	88
5.1	Simpulan.....	88
5.2	Keterbatasan.....	90
5.3	Saran	90
	DAFTAR PUSTAKA	91
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Ringkasan Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner Berdasarkan Instansi	56
Tabel 4.2 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	56
Tabel 4.3 Demografi Responden Berdasarkan Umur	57
Tabel 4.4 Demografi Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	57
Tabel 4.5 Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	58
Tabel 4.6 Demografi Responden Berdasarkan <i>Basic</i> Keilmuan.....	59
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	60
Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas.....	62
Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Uji Validitas.....	64
Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Uji Multikolonieritas Pengujian 1	66
Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Uji Multikolonieritas Pengujian 2	66
Tabel 4.12 Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas Pengujian 1	69
Tabel 4.13 Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas Pengujian 2	69

Tabel 4.14 Uji Statistik Kolmogorov Smirnov Test Pengujian 1	73
Tabel 4.15 Uji Statistik Kolmogorov Smirnov Test Pengujian 2	73
Tabel 4.16 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Pengujian 1	76
Tabel 4.17 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Pengujian 2	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	23
Gambar 4.1 Gambar Grafik <i>Scatterplot</i> Pengujian 1	67
Gambar 4.2 Gambar Grafik <i>Scatterplot</i> Pengujian 2.....	68
Gambar 4.3 Gambar Grafik Histogram Pengujian 1.....	70
Gambar 4.4 Gambar Grafik Histogram Pengujian 2.....	71
Gambar 4.5 Gambar Grafik <i>Normal Probability Plot</i> Pengujian 1	71
Gambar 4.6 Gambar Grafik <i>Normal Probability Plot</i> Pengujian 2	72

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	93
Lampiran 2 Demografi Responden	102
Lampiran 3 Daftar Responden	111
Lampiran 4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	127
Lampiran 5 Hasil Uji Kualitas Data.....	130
Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik	138
Lampiran 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	144
Lampiran 8 Surat Ijin Penelitian	146

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal dan tidak tepat waktu. Keandalan dan *timeliness* informasi laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan terdiri dari:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan yaitu:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau

penyajianya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan

lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003 yang secara khusus menggunakan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja pemerintah, maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang diwujudkan dalam laporan keuangan dituntut keandalan dan *timeliness*. Dengan demikian, adanya kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atas keuangan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan di instansi pemerintah sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi dalam pelaksanaan pelaporan keuangan di instansi pemerintah.

Penelitian–penelitian yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan, antara lain dalam penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) memberikan temuan empiris bahwa kapasitas sumber daya manusia signifikan mempengaruhi *timeliness* pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi signifikan mempengaruhi keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan pemerintah. Pengendalian intern akuntansi

signifikan mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan. Sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak signifikan mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Peneliti Aritonang dan Syarif (2009) menemukan bukti empiris bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, sedangkan sumber daya manusia dan perangkat pendukung tidak signifikan mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menunjukkan bahwa sumber daya manusia signifikan mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Sumber daya manusia pada bagian akuntansi/ tata usaha keuangan sudah mencukupi baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Pemanfaatan teknologi informasi signifikan mempengaruhi keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap *timeliness* pelaporan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten dan masih terbatasnya penelitian di bidang pemerintahan memotivasi peneliti untuk meneliti kembali mengenai pelaporan keuangan pada instansi pemerintah. Pada dasarnya penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008) dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) telah secara spesifik meneliti mengenai faktor yang mempengaruhi penerapan pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, ada kemungkinan faktor ini juga

mempengaruhi penerapan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

2. Penelitian ini menambahkan variabel komitmen organisasi sebagai variabel independen untuk diuji kembali karena telah diteliti sebelumnya oleh Aritonang dan Syarif (2009).

Penelitian ini akan dilakukan pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum di Kota Semarang karena dianggap cukup mewakili kondisi penerapan pelaporan keuangan pada instansi pemerintah di Indonesia. Secara khusus, Satuan Kerja Badan Layanan Umum di Kota Semarang sedang meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan berupaya mewujudkan *good governance* dengan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, akan memberikan kontribusi bagi Satuan Kerja Badan Layanan Umum di Kota Semarang dalam pelaksanaan pelaporan keuangan. Penelitian ini diberi judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan *Timeliness* Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum “**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan Badan Layanan Umum secara khusus di Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum?

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum?
3. Apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum?
5. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap *timeliness* pelaporan keuangan Badan Layanan Umum?
6. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap *timeliness* pelaporan keuangan Badan Layanan Umum?
7. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap *timeliness* pelaporan keuangan Badan Layanan Umum ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : `

1. Menguji pengaruh Sumber Daya Manusia dalam keandalan dan *timeliness* penyusunan pelaporan keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
2. Menguji pengaruh pemanfaatan Teknologi Informasi dalam keandalan dan *timeliness* penyusunan pelaporan keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
3. Menguji pengaruh komitmen organisasi dalam keandalan dan *timeliness* penyusunan pelaporan keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

4. Menguji pengaruh pengendalian intern akuntansi dalam keandalan penyusunan pelaporan keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

1.3.1 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk staf pelaporan Badan Layanan Umum bahwa hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum sebagai wujud pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terhadap pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangannya dalam memenuhi kriteria keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan.
2. Bagi masyarakat sebagai *stakeholder* eksternal, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mendeteksi tingkat keandalan dan *timeliness* sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan dan mendorong agar lebih berpartisipasi dalam mengawasi serta mendorong peningkatan kinerja Badan Layanan Umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik.
3. Untuk akademisi, sebagai wacana bagi perkembangan studi akuntansi pada organisasi sektor publik secara khusus sektor pemerintah mengenai konsep yang berkaitan dengan keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan di instansi pemerintah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi variabel penelitian dan definisi operasional variabel, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi deskripsi obyek penelitian, analisa data, dan interpretasi hasil atau pembahasan dari analisis hasil.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan dan saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling dalam Septiani, 2005).

Menurut Hendriksen dan Breda (1992, h.207) dalam Septiani (2005), prinsipal diasumsikan mempunyai tanggungjawab untuk memilih sistem informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Para pemilik disebut sebagai evaluator informasi dalam konteks ini; agen-agen mereka disebut pengambil keputusan. Evaluator informasi diasumsikan bertanggung jawab untuk memilih sistem informasi. Pilihan mereka harus dibuat sedemikian rupa sehingga para pengambil keputusan membuat keputusan yang terbaik demi kepentingan pemilik berdasarkan informasi yang tersedia bagi mereka. Dengan kata lain bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh agen sehingga fungsi utilitas untuk kepentingan akhir adalah milik prinsipal. Permasalahan tersebut diperumit dengan adanya kebutuhan untuk memperhitungkan fungsi utilitas agen karena fungsi inilah yang menggerakkan aksi-aksi agen.

Prinsipal akan selalu tertarik pada hasil-hasil yang dihasilkan oleh agen mereka. Teori keagenan memberikan tiang pokok bagi peranan penting akuntansi

dalam menyediakan informasi setelah suatu kejadian yang disebut sebagai peranan pasca keputusan. Peran ini seringkali diasosiasikan dengan peran kepengurusan (*stewardship*) akuntansi, dimana seorang agen melapor kepada prinsipal tentang kejadian-kejadian dalam periode yang lalu. Inilah yang memberikan akuntansi nilai umpan baliknya selain nilai prediktifnya (Hendriksen dan Breda dalam Septiani, 2005).

Mengacu pada teori agensi (*agency theory*), akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Haryanto, Sahmuddin, Arifuddin, 2007).

Menurut Jensen dan Meckling (dalam Pramitha, 2010), hubungan *agency* sebagai suatu kontrak di bawah satu atau lebih (*principal*) yang melibatkan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen.

Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. Secara khusus teori keagenan membahas tentang adanya hubungan keagenan, dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt dalam Pramitha, 2010). Pertama adalah masalah keagenan yang

timbul pada saat (a) keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan dan (b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen. Permasalahannya adalah prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu dengan tepat. Kedua adalah masalah pembagian resiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko. Dengan demikian, prinsipal dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda dikarenakan adanya perbedaan preferensi resiko.

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*). Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipalnya.

2.1.2 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-limu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Tyler (dalam Septiani, 2005), terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam *tangible*, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku (Septiani, 2005).

Sedangkan penelitian mengenai teori kepatuhan telah diterapkan secara luas pada perpajakan. Jackson dan Milligram (dalam Septiani, 2005), terdapat 14 variabel-variabel yang mempengaruhi pajak kepatuhan. Variabel-variabel tersebut adalah umur, jenis kelamin, pendidikan, level pendapatan, sumber pendapatan, pekerjaan/status, etika, kewajaran, kompleksitas, hubungan dengan *internal*

revenue service (IRS), sanksi, probabilitas deteksi, dan tingkat pajak. Selain itu terdapat beberapa variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak seperti proporsi pengendalian individu, biaya komplain, pengaruh penyusun pajak, lokasi geografis dan mobilitas pembayar pajak, dan hal-hal lain dimana pembayar pajak mempersepsikan keputusan kepatuhannya.

Beberapa penelitian lainnya mengenai kepatuhan pajak yang meneliti masalah-masalah sangsi terhadap batasan respons dilakukan oleh Christiansen dan Friedland (dalam Septiani, 2005) menemukan adanya bukti mengenai kesamaan efektifitas hukuman yang ringan dan yang berat. Meskipun demikian, masalah mengenai dampak sangsi yang tepat terhadap kepatuhan masih merupakan hal yang kontroversial, walaupun banyak penelitian mengindikasikan sangsi memiliki peran yang penting dalam mempertahankan kepatuhan.

Berdasarkan perspektif normatif maka sudah seharusnya bahwa teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang akuntansi. Apalagi kepatuhan entitas pelaporan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam memenuhi kepatuhan terhadap pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.1.3 Pelaporan Keuangan di Organisasi Sektor Publik

Salah satu cara yang digunakan oleh suatu entitas untuk menggambarkan posisi keuangan adalah dengan menyajikan laporan keuangan. Laporan Keuangan merupakan suatu ringkasan dari proses pencatatan yang merupakan suatu

ringkasan dari proses pencatatan, yang merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan dalam satu tahun buku yang bersangkutan (Baridwan, dalam Septiani 2005).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik sebagaimana bunyi penjelasan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK (2002) dalam Septiani (2005) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan bagian proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi perubahan modal, catatan dan laporan lain serta materi penjelas yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Dalam SAK (2002) juga menjelaskan bahwa pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan dan pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan lembaganya, serta masyarakat yang menggunakan untuk kebutuhan informasi yang berbeda.

2.1.4 Penjelasan tentang Badan Layanan Umum

Pengertian Badan Layanan Umum sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut:

Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa peyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Menurut PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan bahwa sistem akuntansi BLU adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLU.

Berdasarkan PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi BLU terdiri dari:

a. Sistem akuntansi keuangan

Sistem Akuntansi Keuangan menghasilkan laporan keuangan pokok berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia /standar akuntansi industri spesifik dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan sesuai dengan SAK digunakan untuk kepentingan pelaporan kepada pengguna umum laporan keuangan BLU dalam hal ini adalah *stakeholders*, yaitu pihak-pihak yang berhubungan dan memiliki kepentingan dengan BLU. Sedangkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP digunakan untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan BLU dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

b. Sistem akuntansi aset tetap

Sistem Akuntansi Aset Tetap menghasilkan laporan tentang aset tetap untuk keperluan manajemen aset. Sistem ini menyajikan informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLU ataupun bukan milik BLU tetapi berada dalam pengelolaan BLU. Pengembangan Sistem Akuntansi Aset Tetap diserahkan sepenuhnya kepada BLU yang bersangkutan. Namun demikian, BLU dapat menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan seperti Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

c. Sistem akuntansi biaya

BLU mengembangkan Sistem Akuntansi Biaya yang menghasilkan informasi tentang harga pokok produksi, biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, dan evaluasi varian. Sistem Akuntansi Biaya berguna dalam perencanaan dan pengendalian, pengambilan keputusan, dan perhitungan tarif layanan.

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya sebagaimana bunyi PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum , BLU menyusun dan menyajikan:

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan pokok berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

2. Laporan Kinerja

Laporan keuangan pokok disertai dengan Laporan Kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang berisikan ringkasan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program yang disusun dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan pemerintah dengan menggunakan beberapa variabel, seperti penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) melakukan pengujian mengenai variabel-variabel kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa bahwa kapasitas sumber daya manusia signifikan mempengaruhi *timeliness* pelaporan keuangan. Sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/ tata usaha keuangan sudah mencukupi baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Pemanfaatan teknologi informasi signifikan mempengaruhi keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan pemerintah. Pengendalian intern akuntansi signifikan mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan. Sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak signifikan mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah pemerintah.

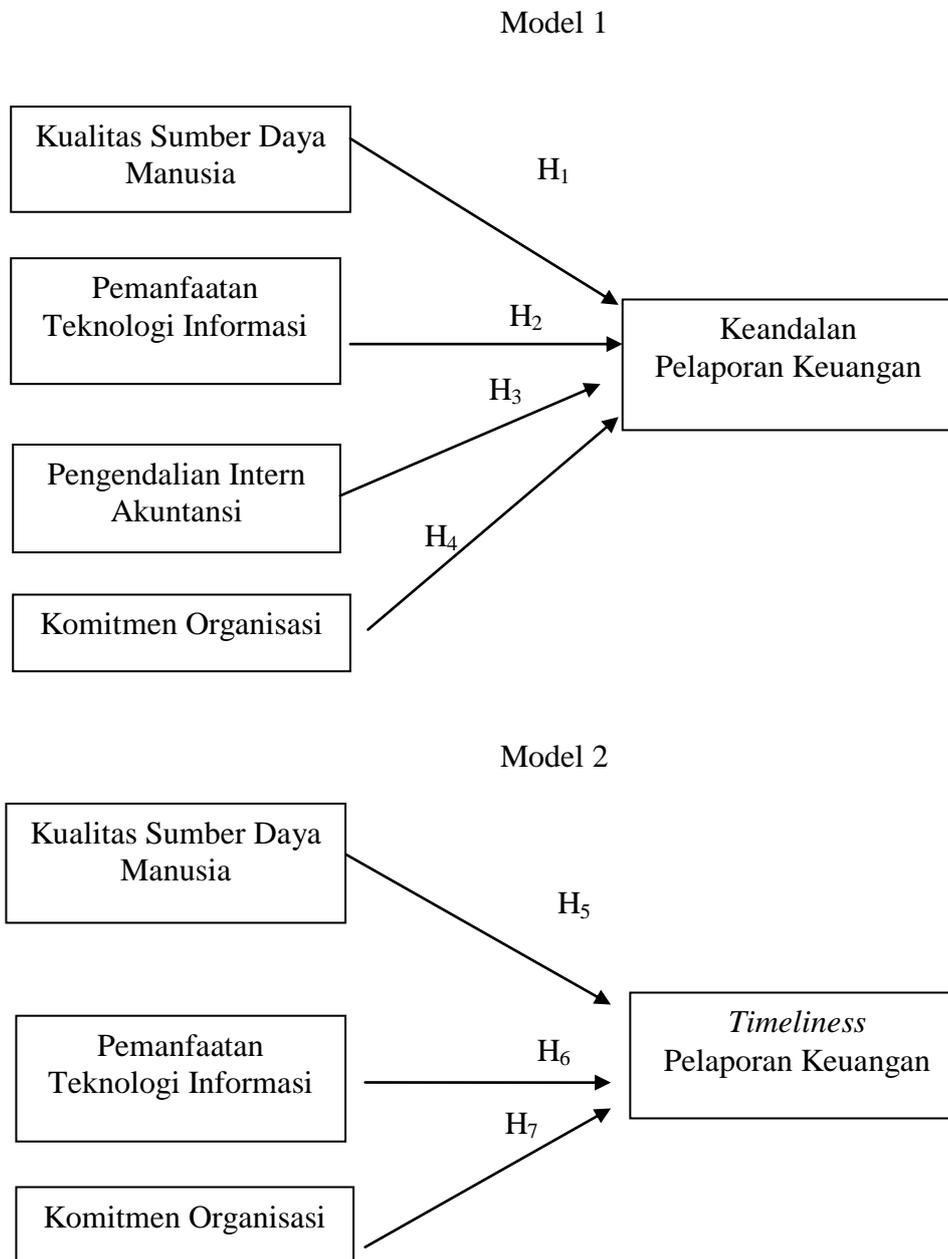
Peneliti Aritonang dan Syarif (2009) melakukan pengujian keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Hasil penelitiannya menemukan bukti empiris bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, sedangkan sumber daya manusia dan perangkat pendukung tidak signifikan mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 menjelaskan tentang keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan pemerintah.

Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) melakukan penelitian mengenai keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan di pemerintah pada enam kabupaten di Jawa Tengah. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sumber daya manusia signifikan mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/ tata usaha keuangan sudah mencukupi baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Pemanfaatan teknologi informasi signifikan mempengaruhi keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan pemerintah. Sedangkan sumber daya manusia tidak signifikan mempengaruhi *timeliness* pelaporan keuangan pemerintah.

2.1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berisi gambar hubungan antar variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini. Sebagai variabel independen adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, komitmen organisasi. Variabel independen ini akan diprediksi pengaruhnya

terhadap variabel dependen keandalan pelaporan keuangan dan *timeliness* pelaporan keuangan.



GAMBAR 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN
 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan *Timeliness* Pelaporan
 Keuangan Badan Layanan Umum
 (Studi Kasus pada Satuan Kerja BLU di Kota Semarang)

2.1.7 Hipotesis

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Indriasari dan Nahartoyo (2008), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) memperoleh hasil bahwa fungsi dan proses akuntansi telah dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi sehingga dapat membantu keandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas dirumuskan hipotesis :

H₁ : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Menurut Indriasari dan Nahartoyo (2008), perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi

keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna atau *multiprocessing*. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi .

Penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) memperoleh bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut :

H₂ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan (Indriasari dan Nahartoyo,2008) .

Indriasari dan Nahartoyo (2008) dalam penelitiannya mengenai nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah dengan menggunakan survey terhadap kepala dan staf bagian akuntansi. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pengendalian intern akuntansi telah memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pelaporan keuangan pemerintah yang tercermin dari keandalan nilai informasi laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas dirumuskan hipotesis :

H₃ : Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka, yaitu Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan dan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku (Septiani, 2005). Dengan demikian adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang *reliable* sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penelitian Aritonang dan Syarif (2009) yang meneliti mengenai keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada pemerintahan. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa komitmen organisasi yang tinggi berdampak pada keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sehingga dapat meningkatkan kualitas keandalan laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut :

H₄ : Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Dalam memperoleh *timeliness* untuk mencapai kebermanfaatan harus dengan mengorbankan kualitas lain yaitu keakuratan/presisi (*accuracy/precision*)

atau keandalan sehingga terdapat *trade-off* antara keandalan dan *timeliness*. (Indriasari dan Nahartoyo, 2008). Namun, walaupun berkurangnya reliabilitas berakibat berkurangnya kebermanfaatan, dimungkinkan untuk mempercepat ketersediaan data secara aproksimasi tanpa mempengaruhi reliabilitas secara material. Dengan begitu *timeliness* dengan aproksimasi justru akan meningkatkan kebermanfaatan secara keseluruhan (Suwardjono dalam Indriasari dan Nahartoyo, 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menemukan bukti empiris bahwa sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan, sedangkan sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. Hasil ini menjadi dasar hipotesis :

H₅ : Tidak ada pengaruh positif antara kualitas sumber daya manusia terhadap *timeliness* pelaporan keuangan.

Agency theory menjelaskan mengenai pemberian wewenang agen kepada prinsipal. Agen membuat keputusan terbaik bagi prinsipal berdasarkan informasi yang tersedia bagi agen, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi untuk mempengaruhi keputusan yaitu *timeliness*. Menurut Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data telah memiliki keunggulan dari sisi kecepatan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu

Penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) memperoleh bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. Hal ini menjadi dasar hipotesis :

H₆ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap *timeliness* pelaporan keuangan.

Luthans (2006) dalam Aritonang dan Syarif (2009) menyatakan bahwa, komitmen organisasi paling sering diartikan sebagai keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Sehingga semakin seorang staf pelaporan keuangan memiliki komitmen organisasi yang tinggi maka dapat meningkatkan *timeliness* pelaporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Aritonang dan Syarif (2009) menemukan bukti empiris bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 terdapat karakteristik agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah relevan. Dalam hal ini salah satu informasi yang relevan adalah tepat waktu . Hasil ini menjadi dasar hipotesis :

H₇ : Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap *timeliness* pelaporan keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum secara khusus pada Kota Semarang. Variabel-variabel yang akan diuji adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, serta komitmen organisasi (sebagai variabel independen) terhadap keandalan pelaporan keuangan (sebagai variabel dependen) dan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi serta komitmen organisasi (sebagai variabel independen) terhadap *timeliness* pelaporan keuangan (sebagai variabel dependen).

Untuk memahami lebih lanjut mengenai variabel-variabel ini maka diberikan definisi operasional. Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut untuk mempermudah pencarian data di lapangan serta pengukuran analisis data (Firmansyah, 2006).

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Tujuan peneliti adalah memahami dan membuat variabel dependen, menjelaskan

varibilitasnya atau memprediksinya. Dengan kata lain, variabel dependen merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi (Uma Sekaran, 2006). Pada penelitian kali ini yang menjadi variabel dependen adalah keandalan pelaporan keuangan dan *timeliness* pelaporan keuangan.

a. Keandalan Pelaporan Keuangan (ANDAL PK)

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 dalam Indriasari dan Nahartoyo (2008), keandalan pelaporan keuangan merupakan kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid.

Berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Tahun 2009 par 31 dikemukakan bahwa :

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*).

b. *Timeliness* Pelaporan Keuangan (TM PK)

Menurut Niarchos dan Georgapoulos (1986) dalam Septiani (2005), pelaporan keuangan yang tepat waktu memiliki relevansi nilai yang lebih besar.

Menurut Hendriksen dan Breda (1992, 136) dalam Septiani (2005), *timeliness* informasi akuntansi harus tersedia bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. *Timeliness* tidak menjamin relevansi tetapi relevansi tidaklah mungkin

tanpa *timeliness*. Oleh karena itu, *timeliness* adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan.

Menurut Amey, Gordon, dan Narayanan (dalam Septiani, 2005), *timeliness* menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. *Timeliness* juga menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Informasi yang tepat waktu dipengaruhi kemampuan manajer dalam merespon setiap kejadian atau permasalahan. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan.

Dalam penyajian laporan keuangan (SAK, 2009), manfaat suatu laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya.

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 dalam Indriasari dan Nahartoyo (2008), *timeliness* pelaporan keuangan merupakan informasi yang tersedia bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen secara positif atau negatif (Uma Sekaran, 2006). Pada penelitian kali ini

yang menjadi variabel independen adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan komitmen organisasi.

a. Kualitas Sumber Daya Manusia (KSDM)

Menurut Susilo (dalam Aritonang dan Syarif, 2009), Persaingan dalam sumber daya manusia sebenarnya adalah persaingan dalam kualitas sumber daya manusia dari setiap organisasi. Baik dalam bentuk perusahaan ataupun lainnya. Kualitas sumber daya manusia ini diukur dari kemampuan pengetahuannya (*knowledge*). Pengetahuan disini dimaksudkan dalam arti luas yaitu kemampuan sumber daya manusia yang tercermin dari kinerjanya dan terlihat dari perilaku kerjanya yang kompeten, cepat, dan inovatif serta dorongan yang kuat untuk belajar.

Menurut Indriasari dan Nahartoyo (2008), kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)

Menurut Wilkinson *et al.* (2000) dalam Indriasari dan Nahartoyo (2009), teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*),

electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

Menurut Indriasari dan Nahartoyo (2008), teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

c. Pengendalian Intern Akuntansi (PIA)

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2001 pada SA seksi 319 par 06 mengartikan pengendalian intern sebagai berikut:

Pengendalian Intern adalah suatu proses- yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel entitas-yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan laporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Mahmudi (2007) dalam Indriasari dan Nahartoyo (2009) menyebutkan bahwa komponen penting yang terkait dengan pengendalian intern akuntansi antara lain sebagai berikut:

1. Sistem dan prosedur akuntansi.

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi tertentu.

2. Otorisasi.

Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan pemerintah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau walaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah atau ilegal.

3. Formulir, dokumen, dan catatan.

Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.

4. Pemisahan tugas.

Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pencatat uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas

pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi.

Menurut Indriasari dan Nahartoyo (2008), pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan.

d. **Komitmen Organisasi (KO)**

Mowday, Porter, dan Steers (1982) dalam Ikhsan dan Ishak (2008, h.35) mengemukakan bahwa:

Komitmen organisasi terbangun apabila masing-masing individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi dan atau profesi, antara lain :

1. Identifikasi (*identification*), yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi.
2. Keterlibatan (*involvement*), yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan.
3. Loyalitas (*loyalty*), yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal.

Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-

tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu (Ikhsan dan Ishak, 2008)

Komitmen organisasi dalam penelitian ini adalah keinginan yang kuat untuk tetap mempertahankan keinginan dirinya dalam organisasi dan bersedia untuk melakukan usaha yang tinggi bagi pencapaian organisasi (Newstroom, 1989 dalam Augustia, 2010).

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu dimana umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Oleh karena itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah staf pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum yang tersebar di kota Semarang. Pemilihan Badan Layanan Umum di Kota Semarang sebagai sampel dikarenakan pertimbangan kemudahan akses yang dimiliki peneliti ke pemerintahan tersebut untuk memperoleh data yang diperlukan. Selain itu karena Badan Layanan Umum di Kota Semarang dianggap cukup mewakili kondisi penerapan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pada instansi pemerintah di Indonesia.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung melalui penyampaian kuesioner kepada responden di bagian keuangan pada Badan Layanan Umum di Kota Semarang yang terdiri dari IAIN Walisongo Semarang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Diponegoro, Politeknik Ilmu Pelayaran, RSUP Dr. Kariadi, dan Politeknik Kesehatan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan survei dengan mendatangi staf pelaporan keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum yang tersebar di Kota Semarang dan meminta bantuan kepada sampel untuk mengisi kuesioner yang tersedia. Adapun jumlah kuesioner yang dikirim sebanyak 125 kuesioner dimana jumlah kuesioner pada masing-masing BLU tidak sama (jumlah tergantung dari ketersediaan dari masing-masing BLU untuk mengisi kuesioner penelitian). Kuesioner akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menanyakan identitas responden. Bagian kedua berisi pertanyaan tentang variabel-variabel penelitian. Jenis pertanyaan kuesioner pada bagian kedua merupakan pertanyaan dengan skala tanggapan yang berpedoman pada skala likert. Cara pengisian kuesioner adalah dengan memilih salah satu antara angka 1 sampai dengan 5 dengan memberi tanda silang (X) yang berhubungan dengan item-item pertanyaan yang telah disediakan, sesuai dengan kondisi dalam unit kerja. Untuk menghindari keraguan responden terhadap

berbagai pertanyaan yang mungkin dianggap sensitif, maka dalam surat permohonan juga diterangkan bahwa informasi dalam responden akan dijaga kerahasiaannya.

3.5 Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis secara kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Adapun analisis data yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum (Ghozali, 2006). Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel.

3.5.2 Uji Kualitas Data

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen dalam kuesioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji reliabilitas dan validitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan alat ukur dalam mengukur objek yang diteliti.

3.5.2.1 Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2006), reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

3.5.2.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *coefficient correlation pearson* yaitu dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor (Ghozali, 2006).

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Normalitas.

3.5.3.1 Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2006), Uji mulikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-

variabel ini tidak orthogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi menurut Ghozali (2006) adalah sebagai berikut :

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
- c. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$) nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance <0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10 . Setiap

peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal nilai tolerance = 0.10 sama dengan tingkat kolonieritas 0.95. Walaupun multikolonieritas dapat dideteksi dengan nilai Tolerance dan VIF, tetapi kita masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah yang saling berkolerasi.

3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

2.5.3.3 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2006), Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak menurut Ghozali (2006) yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

a. Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendeteksi distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan :

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Analisis Statistik

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa

sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual. Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik *non parametric Kolmogorov-Smirnov* (K-S). pedoman pengambilan keputusan tentang data tersebut mendekati atau merupakan distribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov Smirnov dapat dilihat dari :

- a. Nilai Sig. atau signifikan atau probabilitas $< 0,05$, maka distribusi data adalah tidak normal.
- b. Nilai Sig. atau signifikan atau probabilitas $> 0,05$, maka distribusi data adalah normal.

3.5.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan secara multivariate dengan menggunakan regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2007).

Regresi berganda digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel independen kualitas sumber daya manusia (X_1), pemanfaatan teknologi informasi (X_2), pengendalian intern akuntansi (X_3), serta komitmen organisasi (X_4) mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan (Y_1) dan untuk menguji apakah variabel-variabel independen kualitas sumber daya manusia (X_1), pemanfaatan teknologi informasi (X_2), serta komitmen organisasi (X_4) mempengaruhi *timeliness* pelaporan keuangan (Y_2)

Model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \beta_3 \cdot X_3 + \beta_4 \cdot X_4 + \varepsilon$$

$$Y_2 = \beta_5 \cdot X_1 + \beta_6 \cdot X_2 + \beta_7 \cdot X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y_1 = Keandalan pelaporan keuangan

Y_2 = *Timeliness* pelaporan keuangan

X_1 = Kualitas sumber daya manusia

X_2 = Pemanfaatan teknologi informasi

X_3 = Pengendalian intern akuntansi

X_4 = Komitmen organisasi

ε = *error*

Pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan menggunakan Uji *Goodness of Fit Model*. Uji *Goodness of Fit Model* digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksirkan nilai aktual. Secara statistik, *goodness of fit* dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t.

3.5.4.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Semakin nilai R^2 mendekati satu maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, jika

nilai R^2 semakin kecil maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat terbatas.

3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F merupakan uji model yang menunjukkan apakah model regresi fit untuk diolah lebih lanjut. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi $f > 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan variabel-variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $f \leq 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara simultan variabel-variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4.3 Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan dengan menggunakan

significance level 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $t \leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.